

# **PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN TRANSPARANSI TERHADAP IMPLEMENTASI *GOOD VILLAGE GOVERNANCE* (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng)**

<sup>1</sup>Putu Listia Ika Wardani, <sup>1</sup>Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, <sup>2</sup>Made Aristia Prayudi

Prodi S1 Akuntansi  
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [putulistia@gmail.com](mailto:putulistia@gmail.com), [ayurencana@udiksha.ac.id](mailto:ayurencana@udiksha.ac.id),  
[prayudi.acc@udiksha.ac.id](mailto:prayudi.acc@udiksha.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan transparansi terhadap implementasi *good village governance*. Mengenai permasalahan penyalahgunaan APBDes oleh beberapa Kepala Desa di Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Penelitian ini dilakukan pada desa di Kabupaten Buleleng. Populasi penelitian ini adalah sejumlah 129 Desa di Kabupaten Buleleng. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* dan diperoleh sebanyak 56 desa sebagai sampel serta tiap desa terdapat 3 responden, sehingga jumlah responden sebanyak 168. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap implementasi *good village governance*, (2) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap implementasi *good village governance*, dan (3) transparansi berpengaruh positif terhadap implementasi *good village governance*.

Kata kunci: Gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, transparansi, *good village governance*

## **ABSTRACT**

*This study aimed at determining the effect of leadership style, community participation, and transparency on the implementation of good village governance. Regarding the problem of misuse of APBDes by several Village Heads in Buleleng Regency. The method used was a quantitative research method with the primary data obtained from questionnaire data measured through a Likert scale. This research was conducted in villages in Buleleng Regency. The population of this study was 129 villages in Buleleng Regency. The sampling method in this study employed probability sampling method and obtained as many as 56 villages as samples and each village had 3 respondents, so the number of respondents was 168. The research data were collected through a questionnaire then processed through multiple linear regression analysis test with the assistance of SPSS. The results of the study stated that (1) the leadership style had a positive effect on the implementation of good village governance, (2) the community participation had a positive effect on the implementation of good village governance, and (3) the transparency had a positive effect on the implementation of good village governance.*

**Keywords:** Leadership style, community participation, transparency, *good village governance*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meliputi hak pemerintah daerah mengatur kekayaan daerahnya sendiri, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cornawall & Gaventa dalam Moch (2012), bahwa pemerintahan lokal memiliki peluang yang besar untuk mendorong demokratisasi karena proses desentralisasi lebih memungkinkan adanya pemerintahan yang responsif, representatif, partisipatif, dan akuntabel. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membuka ruang politik bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkat nasional, regional, daerah, maupun pada tingkat pemerintahan desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, sebagai upaya wujudkan *Good Village Governance* (Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik). *Good Village Governance* pada dasarnya dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Good Governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Menurut Moch (2012) pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mengarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu sama lainnya dalam mengimplementasikan *good village governance* adalah, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu mutlak diperlukan

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas semua keputusan dan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan. Keterbukaan juga dibutuhkan untuk meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dengan memberi masukan, dukungan sekaligus kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa. Jika tiga pilar tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut nama Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dalam hal ini, desa memiliki pemerintahan sendiri yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana desa dari pemerintah pusat. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa 20.776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia sebanyak 74.093 desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang harus dicantumkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan di dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahun. Dana Desa diperuntukan membiayai 4 (empat) program prioritas diantaranya *One Village One Product*, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Embung Desa, dan Sarana Olahraga. Keempat program prioritas tersebut disusun agar menjadi daya ungkit peningkatan perekonomian perdesaan. Menurut Kemendes PDTT, BUMDes menjadi salah satu program prioritas, karena melalui BUMDes masyarakat desa didorong untuk mengelola ekonomi secara otonom yang bertujuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya. Besarnya dana desa yang diterima setiap desa harus dikelola dengan baik oleh aparatur pemerintah desa dan membutuhkan pengawasan agar tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kalau tidak, akan menyebabkan risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang semakin besar.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tata kelola desa yang baik, diantaranya: gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Teori *stewardship* dirasa lebih cocok mengingat teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

Gaya kepemimpinan di desa menjadi peran penting karena desa yang baik berawal dari pemimpin yang baik. Menurut Ardana *et. al.* (2011), gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang

akan ditunjukkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang lain atau karyawan. Pola perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai-nilai, asumsi, persepsi, harapan, maupun sikap yang ada dalam diri pemimpin. Indikator dari gaya kepemimpinan yaitu memperhatikan kebutuhan bawahan, simpati terhadap bawahan, menciptakan suasana saling percaya, memiliki sikap bersahabat dan menumbuhkan peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan (Astuti, 2008). Fungsi dari gaya kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan situasi sosial dan kehidupan dalam kelompok atau organisasi masing masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada dalam situasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Gaya kepemimpinan (X<sub>1</sub>) berpengaruh terhadap implementasi *good village governance*

Dalam pengelolaan dana desa (DD) partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat menurut Raharjo (2015) adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan di desa. Dengan partisipasi masyarakat pemerintah desa dapat memperoleh ide-ide program ataupun aspirasi dari masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di desa. Dengan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal, maka diharapkan seluruh dana untuk pengelolaan desa dapat ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat, bukan keinginan para pemerintah desa bersama elit-elit desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Partisipasi masyarakat dijadikan sebagai aspirasi dalam penyampaian pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pendapat

dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Menurut Adi (2007), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk setiap anggota masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, potensi yang ada di masyarakat, kemudian pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani setiap masalah yang ada, pelaksanaan upaya untuk mengatasi setiap permasalahan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang akan terjadi. Menurut Soetomo (2006), pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. Hasil penelitian Purba (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan meningkatkan *good governance* di tingkat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Partisipasi masyarakat (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap implementasi *good village governance*

Transparansi tidak hanya untuk menyediakan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan adanya kemudahan bagi setiap anggota masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat. Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi yang akurat mengenai pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad, 2007). Menurut Karina P (2003), transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses kebebasan bagi setiap orang dalam memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Salah satunya transparansi pengelolaan keuangan daerah pada

akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Sutarno, 2013). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Transparansi (X<sub>3</sub>) berpengaruh terhadap implementasi *good village governance*

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap implementasi *good village governance*, (2) pengaruh partisipasi masyarakat terhadap implementasi *good village governance*, dan (3) pengaruh transparansi terhadap implementasi *good village governance*

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala *likert*. Penelitian ini dilakukan pada desa di Kabupaten Buleleng. Populasi penelitian ini adalah sejumlah 129 Desa di Kabupaten Buleleng. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *probability sampling*; *simple random sampling*, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu sendiri dan diperoleh sebanyak 56 desa sebagai sampel serta tiap desa terdapat 3 responden, sehingga jumlah responden sebanyak 168. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil pada penelitian ini meliputi hasil uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji statistik deskriptif dilakukan untuk

mengetahui nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Hasil uji statistik

deskriptif disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
X <sub>1</sub>	64	95	78,65	7,51
X <sub>2</sub>	14	20	17,65	1,81
X <sub>3</sub>	24	35	30,11	3,21
Y	45	65	56,32	4,90

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa data gaya kepemimpinan memiliki skor minimum 64 dan skor maksimum 95. Skor rata-rata 78,65 dengan standar deviasi 7,51. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap gaya kepemimpinan tidak bervariasi.

Data partisipasi masyarakat memiliki skor minimum 14 dan skor maksimum 20. Skor rata-rata 17,65 dengan standar deviasi 1,81. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap partisipasi masyarakat tidak bervariasi.

Data transparansi memiliki skor minimum 24 dan skor maksimum 35. Skor rata-rata 30,11 dengan standar deviasi 3,21. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa transparansi sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon terhadap transparansi tidak bervariasi.

Data *good village governance* memiliki skor minimum 45 dan skor maksimum 65. Skor rata-rata 56,32 dengan standar deviasi 4,90. Standar deviasi lebih kecil dari skor rata-rata menunjukkan bahwa *good village governance* sebaran skornya semakin dekat dari skor rata-ratanya, yang mengindikasikan respon

terhadap *good village governance* tidak bervariasi.

Uji yang dilakukan selanjutnya adalah uji kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan dinyatakan bahwa nilai  $r_{hitung}$  untuk semua item lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,156$  (pada  $N = 159$ ) sehingga sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner gaya kepemimpinan ( $X_1$ ), partisipasi masyarakat ( $X_2$ ), transparansi ( $X_3$ ), dan *good village governance* ( $Y$ ) dinyatakan valid. Valid berarti bahwa instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2009).

Setelah itu, dilakukan uji reliabilitas untuk seluruh item pertanyaan dalam suatu kuesioner. Reliabilitas instrumen penelitian dinilai melalui besaran koefisien *Alpha Cronbach*, yang menunjukkan konsistensi internal item-item yang mendasari sebuah variabel. Nilai suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian menunjukkan semua variabel memiliki *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,70. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuesioner gaya kepemimpinan ( $X_1$ ), partisipasi masyarakat ( $X_2$ ), transparansi ( $X_3$ ), dan *good village governance* ( $Y$ )

adalah reliabel. Reliabel berarti bahwa instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2009).

Setelah uji kualitas data terpenuhi, dilakukan uji asumsi klasik. Penelitian ini melakukan 3 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji *goodness of fit* antar distribusi sampel dan distribusi lainnya. Uji normalitas dilakukan dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dengan bantuan program statistik komputer SPSS versi 24.0 for windows. Peneliti menggunakan taraf signifikansi 5%, maka variabel penelitian dikatakan berdistribusi normal jika nilai analisis *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik *Kolmogorov-Smirnov Z*. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data terdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawanya (2) *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 10% atau VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan model telah bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai

VIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yang selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui uji *Glejser*. Jika probabilitas signifikan masing-masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara variabel bebas dengan *absolute residual* (ABS) lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas.

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu untuk melihat pengaruh diantara dua variabel atau lebih.

Uji hipotesis yang pertama dilakukan adalah uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan nilai dari *Adjusted R Square* karena *Adjusted R Square* dianjurkan digunakan pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2011). Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2  
Uji Koefisien Determinasi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,875	0,766	0,761	2,393

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi sebesar 0,761. Hal ini menunjukkan bahwa 76,1% variabel *good village governance* dipengaruhi oleh variabel gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, transparansi, sedangkan 23,9% dipengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya dilakukan uji statistik t yang menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variansi variabel dependen. Penetapan untuk

mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka Hipotesis ditolak yang artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Hipotesis diterima yang artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji statistik t pada penelitian ini disajikan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3  
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,005	2,222		3,153	0,002
X <sub>1</sub>	0,268	0,035	0,410	7,711	0,000
X <sub>2</sub>	0,876	0,143	0,324	6,125	0,000
X <sub>3</sub>	0,426	0,094	0,279	4,534	0,000

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa gaya kepemimpinan memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H<sub>1</sub> diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good village governance*.

Partisipasi masyarakat memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H<sub>2</sub> diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good village governance*.

Transparansi memiliki nilai signifikansi uji t sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H<sub>3</sub> diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good village governance*.

### Pembahasan Pengaruh Gaya Kepemimpinan

### Terhadap *Good Village Governance*

Hasil pengujian hipotesis pertama mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *good village governance* menunjukkan nilai koefisien regresi 0,268 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good village governance*.

Kompetensi menunjukkan suatu keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen organisasi, Kepemimpinan dibutuhkan oleh manusia karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu pada diri manusia. *Teori Stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, dapat dipercaya. Berintegritas tinggi dan

memiliki kejujuran. *Teori Stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007).

*Teoristewardship* menemukan bahwa realokasi kontrol perusahaan dari pemilik ke manajer profesional mungkin merupakan perkembangan positif untuk mengelola kompleksitas perusahaan modern. Memiliki kontrol memberdayakan manajer untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan pencapai *good village governance*. Dengan menggunakan model penatalayanan, dewan yang didominasi orang dalam disukai karena pengetahuan mereka yang mendalam, akses terhadap informasi operasi terkini, keahlian teknis dan komitmen terhadap perusahaan.

Menurut Ardana, *et. al.* (2011), gaya kepemimpinan ialah pola perilaku yang akan ditunjukkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang lain atau karyawan. Pola perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai-nilai, asumsi, persepsi, harapan, maupun sikap yang ada dalam diri pemimpin. Indikator dari gaya kepemimpinan yaitu memperhatikan kebutuhan bawahan, simpati terhadap bawahan, menciptakan suasana saling percaya, memiliki sikap bersahabat dan menumbuhkan peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan (Astuti, 2008). Indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan berdasarkan Trisnainingsih (2007) terdiri dari hubungan pemimpin dan bawahan, komunikasi pimpinan dan bawahan, keharmonisan di tempat kerja, dan kewajiban setiap karyawan.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini dilakukan oleh Helmayani (2018), yang menemukan bahwa secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *good village governance*.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Good Village Governance**

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh partisipasi masyarakat

terhadap *good village governance* menunjukkan nilai koefisien regresi 0,876 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good village governance*.

Partisipasi masyarakat dijadikan sebagai aspirasi dalam penyampaian pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Konsep *teori Stewardship* memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik baiknya ditujukan untuk memenuhi *stakeholder*. Hal ini menghindari adanya konflik kepentingan antara *stake holder* dengan manajemen yang menjalankan organisasi pemerintahan. *Teori stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Cribb, 2006). *Stewardship* didefinisikan oleh Hernandez (2008) sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Ini ada sejauh aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan *stakeholder*.

Menurut Adi (2007), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk setiap anggota masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah, potensi yang ada di masyarakat, kemudian pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani setiap masalah masalah yang ada, pelaksanaan upaya untuk mengatasi setiap permasalahan, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang akan terjadi. Menurut Soetomo (2006), pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dan salah satu bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku.

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini dilakukan oleh Purba (2015), yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan meningkatkan *good governance* di tingkat Desa Aras Kabu Lubuk Pakam Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Good Village Governance**

Hasil pengujian hipotesis ketiga mengenai pengaruh transparansi terhadap *good village governance* menunjukkan nilai koefisien regresi 0,426 dengan nilai signifikansi uji t sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good village governance*.

Transparansi tidak hanya untuk menyediakan informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan adanya kemudahan bagi setiap anggota masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat. *Teori stewardship* menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007).

*Teoristewardship* menemukan bahwa realokasi kontrol perusahaan dari pemilik ke manajer profesional mungkin merupakan perkembangan positif untuk mengelolakompleksitas perusahaan modern. Memiliki kontrol memberdayakan manajer untukmemaksimalkan keuntungan perusahaan dan pencapain *good village governance*. Dengan menggunakan model penatalayanan, dewan yang didominasi orang dalam disukai karena pengetahuan mereka yang mendalam, akses terhadap informasi operasi terkini,keahlian teknis dan komitmen terhadap perusahaan.

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Ini dilakukan sebagai upaya

dalam mengaktualisasi diri sebagai pegawai pemerintah yang patuh maupun untuk tujuan politik seperti mencari simpati, dan upaya dalam mendapat kepercayaan publik. Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dankebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Menurut Karina (2003), transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan peaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dapat ditarik simpulan, yaitu: (1) gaya kepemimpinan ( $X_1$ ) memiliki koefisien regresi 0,268. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap *good village governance* (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan gaya kepemimpinan ( $X_1$ ) dapat meningkatkan *good village governance* (Y) sebesar 0,268 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. (2) partisipasi masyarakat ( $X_2$ ) memiliki koefisien regresi 0,876. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap *good village governance* (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan partisipasi masyarakat ( $X_2$ ) dapat meningkatkan *good village governance* (Y) sebesar 0,876 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap, dan (3) transparansi ( $X_3$ ) memiliki koefisien regresi 0,426. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa transparansi ( $X_3$ ) berpengaruh positif terhadap *good village governance* (Y). Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan transparansi ( $X_3$ ) dapat meningkatkan *good village governance* (Y) sebesar 0,426 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap.

## Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini bagi pemerintah desa diharapkan dapat mengoptimalkan tata cara memimpin yang baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas agar pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan baik secara transparan maupun akurat, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa berhasil. Rutin mengadakan rapat anggota untuk membahas mengenai jalannya pemerintahan desa. Hal ini akan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah khususnya dalam pembangunan harus berdasarkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini harus selalu dilibatkan sejak awal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan, sehingga seluruh dana untuk pengelolaan desa dapat ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu pendekatan terhadap masyarakat perlu dilakukan untuk menumbuhkan rasa simpati masyarakat sehingga masyarakat mau ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Melakukan sosialisasi mengenai kegiatan kegiatan pemerintah untuk memberikan gambaran mengenai program pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di harapkan informasi yang di berikan ke masyarakat lebih transparan agar tidak timbulnya kesalahpahaman antara masyarakat dan anggota perangkat desa. Dengan mengadakan rapat setiap bulan antara anggota pemerintahan desa dengan masyarakat dalam upaya menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Bagi masyarakat diharapkan selalu dapat meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang

diadakan melalui forum resmi atau forum tidak resmi. Dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat, diharapkan masyarakat dapat menjadi pengawas tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dana desa. Selain itu dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mendukung implementasi tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Bagi peneliti selanjutnya jika tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dapat menambah ataupun menggunakan variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, agar koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat ditingkatkan dengan penambahan variabel independen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Purba, Irma Sunarty. 2015. *Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa*. [Online]. Tersedia pada <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/908/915> (diakses tanggal 15 Januari 2019).
- Raharja, Gede Pose. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Pengawas Internal Terhadap Kinerja Organisasi (Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng)*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Program S1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D 12th Edition*. Bandung: CV Alfabeta.